

UNTUK TAHAP AWAL

Kementan Salurkan 124.225 Dosis Vaksin PMK

JAKARTA (KR) - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian telah menyalurkan 124.225 dosis vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada tahap awal, guna menangani penyebaran penyakit hewan ternak tersebut.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pada 2025 Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap kepada 25 provinsi dengan kasus PMK.

"Dari 4 juta dosis vaksin yang disiapkan pada 2025, sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit perbibitan," kata Agung di Jakarta, Senin (13/1).

Agung merinci, tujuh provinsi penerima vaksin tahap pertama tersebut meliputi Jawa Barat dengan 20.000 dosis; Sumatera Barat (20.000 dosis), Sumatera Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit perbibitan ternak (3.225 do-

sis).

Ia menuturkan, distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi. Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret.

"Sedangkan alokasi 2 juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli hingga September 2025," jelasnya.

Dirjen PKH menegaskan, Kementan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesehatan hewan di Indonesia. Dalam upaya menanggulangi kenaikan kasus PMK, Kementan melalui Ditjen PKH telah mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin PMK buatan lokal yang diproduksi Balai Besar Veteriner Farma

(Pusvetma) pada Desember 2024.

Menurut Agung, Pusvetma sebagai laboratorium rujukan PMK nasional, telah menjadi produsen utama vaksin milik Pemerintah.

Sebelumnya, pada Desember 2024, vaksin hibah sebanyak 51.200 dosis telah disalurkan ke delapan provinsi, selain 65.000 dosis vaksinasi mandiri yang dilakukan di berbagai wilayah.

Sementara itu, Kepala Pusvetma Edy Budi Susila menambahkan, pendistribusian vaksin ini diharapkan dapat segera diaplikasikan untuk menekan angka kasus PMK di Indonesia. "Pusvetma siap memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjamin kualitas vaksin telah sesuai dengan standar nasional sehingga dijamin aman dan memiliki efikasi (khasiat) sebagaimana yang dipersyaratkan," kata Edy.

Upaya Kementan dalam mendistribusikan vaksin PMK buatan lokal ini diharapkan tidak hanya melindungi kesehatan ternak, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan nasional. **(Ant/San)-d**



KR-Antara/Muhammad Ramdan

WASPADA BANJIR ROB: Warga melintasi banjir rob di Muara Angke, Jakarta, Senin (13/1/2025). BPBD DKI Jakarta mengimbau warga Pesisir Utara Jakarta untuk waspada terhadap potensi banjir rob hingga 17 Januari 2025 akibat pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase Bulan Purnama.

Polda

Sambungan hal 1

yang sedang berjalan dan mereka menerimanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada dua perbedaan keterangan antara korban sebelum meninggal dan pernyataan resmi dari Polresta Yogyakarta yang menyebutkan korban sakit saat dibawa petugas kemudian dilarikan ke rumah sakit. Menurut pengakuan korban dengan keluarga, setelah dijemput oleh tiga anggota menggunakan minibus warna hitam tersebut, ketika baru berjalan 500 me-

ter korban bermaksud mengambil obatnya yang tertinggal di rumah. Namun tidak diperbolehkan dan setelah izin untuk buang air kecil yang diikuti petugas dirinya dipukuli bagian kepala dan dada hingga pingsan. "Di tubuh korban saat di rawat di rumah sakit juga ditemukan lebam-lebam, juga menurut dokter ring jantung yang dipasang mengalami miring," kata istri korban, Poniyem.

Setelah korban meninggal, ungkap Poniyem, petugas dari Polresta

Yogyakarta mengajak bertemu untuk melakukan perdamaian. Bahkan dalam pertemuan di rumah pemilik mobil rental tersebut petugas membrikan uang damai Rp 25 juta.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk saat ini penyidik masih fokus dalam pemeriksaan saksi dahulu. Langkah ini sesuai yang tertuang dalam laporan polisi dan pelaksanaan ekshumasi Darso.

(Cry)-d

Pancasila

Sambungan hal 1

seandainya hal tersebut merupakan tanggapan terhadap perkembangan jaman. Tetapi bila perubahan tersebut mencakup hal-hal mendasar seperti UN, Zonasi, serta struktur tatakelola Kementerian Pendidikan maka ini menjadi sinyal terjadinya kebingungan mengelola pendidikan. Perubahan kebijakan mendasar pendidikan menjadi bukti kuat lemahnya atau bahkan tiadanya pondasi kuat pendidikan yang kita anut. Padahal, Pancasila cukup baik, relevan, dan kontekstual menjadi pondasi kebijakan pendidikan nasional.

Sila pertama Pancasila, sangat baik untuk menegaskan tujuan Pendidikan Nasional. Pendidikan kita tidak hanya mengembangkan manusia muda Indonesia semata sebagai makhluk biologis yang unggul. Pendidikan harus membantu manusia muda Indonesia menjadi pribadi spiritual juga. Karena kita meyakini bahwa semua makhluk adalah ciptaan Tuhan, sila pertama mestinya menjadi dasar untuk mendidik kesadaran dan komitmen kaum muda dalam menghargai dan merawat kehidupan semua ciptaan. Pandangan dan sikap hidup eksklusif yang dikembangkan oleh sebuah entitas pendidikan harus dianggap bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila kedua, sangat sesuai sebagai pondasi pengembangan manusia Indonesia yang harus tumbuh optimal rasio dan rasanya. Sila kedua menuntut pelaksanaan pendidikan yang menjamin berkembangnya anak muda secara holistik. Dengan cara demikian, kesadaran dan tingkah laku untuk menghormati kemanusiaan manusia lain dari berbagai golongan, harus menjadi bagian dari pembela-

jaran serta tatakelola dan kebijakan satuan pendidikan. Dengan penerapan sila kedua ini, pendidikan kita tidak boleh bersifat eksklusif apalagi rasial.

Sila ketiga Pancasila sangat bagus menjadi pondasi pengembangan kolaborasi dan sinergi antar berbagai komponen, pihak dan jenjang dari dunia pendidikan dan yang melingkupinya. Yang pokok, pendidikan Indonesia harus digagas sebagai kerja bersama seluruh entitas bangsa. Dengan gagasan tersebut, pendidikan harus merangkul semua elemen masyarakat untuk terlibat. Pendidikan tidak sepatutnya digagas sebagai kerja kompetitif yang dapat menegasikan satu sama lain. Mestinya perbedaan perlakuan terhadap entitas pendidikan negeri dan swasta harus diakhiri. Pendidikan negri dan swasta harus sama-sama mendapat dukungan pemerintah secara memadai.

Sila keempat sangat tepat menjadi rujukan dalam mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang berkualitas. Sila ini menjadi dasar yang tepat untuk mengembangkan anak didik memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warganegara yang baik. Kesadaran dan tanggung-jawab itu akan membantu menyiapkan generasi muda mengambil bagian penting dalam pengelolaan hidup bersama sebagai bangsa yang menganut sistem demokrasi. Sila ini memberikan panduan yang baik bagaimana sikap demokratis dan menghargai kepentingan banyak pihak harus menjadi bagian dari seluruh tata kelola sekolah dan pembelajaran. Hanya lewat cara demikian, persoalan korupsi yang memalukan itu dapat secara sistemik diatasi lewat pendidikan kewargane-

garaan yang baik.

Akhirnya sila kelima tepat untuk menjadi pondasi kukuh berbagai kebijakan tata kelola yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kementerian lain yang terkait.

Sila kelima mestinya menjadi dasar dan cara kerja pendidikan negeri terutama PTN dalam melayani masyarakat. Karena PTN pada dasarnya milik seluruh warganegara maka PTN harus dibuat terjangkau oleh sebanyak mungkin warga. Kebijakan yang menempatkan warga kurang mampu kalah prioritas dengan mereka yang berpunya untuk mendapat layanan PTN, sama saja menegasikan amanat sila kelima Pancasila. Demikian pula, pemberian privelese bagi PTN dalam tatakelola dan pemberian layanan pendidikan kepada masyarakat sama saja dengan menempatkan seolah PTS tidak signifikan berkontribusi dalam pendidikan.

Sila kelima mestinya menjadi dasar yang baik bagi penentuan peran yang unik atau khas dan tidak saling mematisikan antara PTN dan PTS. Kebijakan PTNBH yang memungkinkan PTN menerima mahasiswa dengan jumlah yang banyak serta memakai jalur pendanaan mandiri, bukan hanya melanggar sila keadilan sosial tetapi sudah mengingkari jati diri PTN sebagai milik rakyat. Oleh karena itu, kebijakan untuk menetapkan peran dan kapasitas satuan pendidikan negeri dan swasta haruslah bersifat kolaboratif dan komplementatif. Tidak seperti sekarang ini, kebijakan seringkali berakhir dengan sifat eksklusif dan kompetitif.

(Penulis adalah Dosen tetap Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)-d

Raline

Sambungan hal 1

Edwin Hidayat Abdullah menjadi Dirjen Ekosistem Digital, Alexander Sabar sebagai Dirjen Pengawasan Ruang Digital, dan Fifi Aleyda Yahya sebagai Dirjen Komunikasi Publik dan Informasi Kemkomdigi.

Ismail dilantik sebagai Sekjen, dari sebelumnya Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, serta Arief Tri Hardiyanto sebagai Inspektur Jenderal Kemkomdigi.

Meutya juga melantik sejumlah Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri. Raden Wijayakusuma Wardhana dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya; Molly Prabawati sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa, serta Mohammad Hadiana sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi.

Sementara Aida Rezalina menjadi Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga dan Program Strategis, Raline Rahmat Shah sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, serta Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi.

Aktris Raline Shah menyatakan siap mengemban amanah sebagai Staf Khusus Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. "Saya yakin saya bisa menjalankan dengan baik. Jadi saya ambil dengan besar hati dan juga jam kerja saya juga sudah ditentukan dengan jelas. Makanya saya bisa mengambil jabatan ini dan menerimanya dengan positif," ucap Raline.

Raline mendapat tugas untuk membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintahan di luar negeri. "Yang pasti sudah ada beberapa program ke luar negeri untuk mem-

bicarakan kemitraan dengan perusahaan swasta di luar negeri dan juga beberapa pemerintahan seperti Singapura dan India," ujarnya.

Menurutnya, program-program yang diembannya akan berfokus pada sektor telekomunikasi dan digital. Raline juga memastikan kariernya di dunia seni tetap berjalan meskipun akan ada penyesuaian. "Tapi yang pasti semua kerjaan saya sebagai pegiat seni, sebagai model, influencer akan terus berjalan. Tapi mungkin kapasitasnya beda," ucapnya.

Meutya menjelaskan, penunjukan Raline Shah bukan semata-mata karena latar belakangnya sebagai selebriti, melainkan karena perannya sebagai pekerja seni yang dinilai dapat membawa perspektif baru dalam memperkaya ide-ide kebijakan kementerian. Sedangkan kepada Fifi Aleyda Yahya, Menkomdigi berpesan untuk memastikan komunikasi publik berjalan efektif, transparan, dan kredibel. "Kepada Ibu Dirjen Komunikasi Publik dan Media, untuk memastikan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan juga kredibel," ujar Meutya.

Meutya mengatakan, pada struktur baru di Kemkomdigi, Ditjen yang dipimpin oleh Fifi memiliki unsur kata media. Karena itu, ia meminta kepada Fifi untuk menguatkan kerja sama antara Kemkomdigi dengan media massa sebagai mitra strategis. **(Ant/San)-d**

Diperiksa

Sambungan hal 1

Menurut Maqdir, Hasto diperiksa dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan. "Dan ingin saya sampaikan proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilaksanakan. Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik," jelasnya, seraya menambahkan, untuk pemeriksaan yang akan datang tentu pihaknya akan ikuti sesuai kebutuhan dari pihak penyidik.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut penyidik memeriksa HK mengenai barang bukti yang ditemukan penyidik dan menyangkut keterangan dari para saksi dalam kasus yang melibatkan dirinya. Selain itu masih ada beberapa saksi yang belum diperiksa, sehingga HK belum ditahan.

Untuk yang berkaitan belum ditahannya HK, Tessa mengatakan, hasil koordinasi dirinya de-

ngan penyidik karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi. "Para saksi yang dibutuhkan masih belum hadir," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Para saksi itu, kata Tessa, antara lain mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri dan anggota DPR RI Maria Lestari. Karena itu, penyidik KPK menilai saat ini belum perlu dilakukan penahanan terhadap Hasto. "Dalam hal ini penyidik menilai belum diperlukan dilakukan penahanan. Dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut

umum sepakat bahwa berkas ini siap untuk dilimpahkan maka proses tersebut akan dilanjutkan," ujarnya.

Sementara menyangkut pemeriksaan yang dilakukan penyidik, disebutkan Tessa, yang bersangkutan diperiksa soal barang bukti yang ditemukan penyidik. Selain itu mengenai keterangan dari para saksi dalam kasus yang melibatkan dirinya. "Jadi, secara umum yang bersangkutan diminta keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain," tutur Tessa. **(Full/Ant)-d**



Prakiraan Cuaca Selasa, 14 Januari 2025

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sloman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95



Ferian Fauzi Abdulloh, MKom
Dosen Informatika Universitas AMIKOM Yogyakarta

DR Reza menggenggam kertas penolakan publikasinya dengan gemetar. Sepuluh tahun

Di Balik Naskah Ilmiah

penelitiannya, ribuan jam eksperimen, ratusan percobaan - semuanya terancam sia-sia. Publikasi penelitiannya yang berisi 10 halaman ditolak, karena aturan jurnal membatasi hanya 6 halaman. "Hanya karena harus enam halaman?" gumarnya nyaris putus asa.

Malam itu, di laboratorium yang sepi, dia teringat perjalanan panjangnya. Seorang peneliti muda dari keluarga sederhana, yang ayahnya seorang

petani tembakau di lereng pegunungan. Setiap lembar kertas penelitiannya adalah tetesan keringat orangtuanya. Tiba-tiba, telepon genggamnya bergetar. Sang ibu di tengah-tengah kegundahan itu "Anakku, kamu tidak boleh menyerah," suara lembut itu mengalir. Ingat perjuanganmu selama ini."

Air mata mulai membasahi proposal penelitiannya. Setiap paragraf adalah kenangan. Setiap

referensi adalah pengorbanan keluarga yang rela menjual sawah demi biaya kuliahnya. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang radikal Dengan keberanian dan keputusasaan, dia mulai merombak total naskahnya. Menghilangkan contoh-contoh tambahan, menyederhanakan metodologi, memadatkan argumentasi ilmiah tanpa mengurangi substansi utama.

Enam jam tanpa henti.

Enam cangkir kopi. Enam lembar kertas yang penuh makna.

Ketika matahari terbit, DR. Reza tersenyum. Naskahnya pun kini sempurna - enam halaman murni inspirasi dan dedikasi. Sebuah email pun dikirim. Menunggu. Detik-detik terasa seperti tahun. Kemudian, balasan dari editor datang...

"Selamat, naskah Anda diterima."

Air mata bahagia bercampur dengan senyum kemenangan. Bukan sekadar publikasi, tapi pembuktian bahwa mimpi tidak dibatasi oleh sekadar jumlah halaman.

Setiap lembar kertas adalah cerita perjuangan. Setiap kata adalah saksi keberanian. Dan surat penerimaan menjadi bukti hasil kerja keras serta pantang menyerah.

Kisah Dr. Reza



mengingatkan kita bahwa sejatinya ilmu pengetahuan bukanlah tentang kuantitas, melainkan kualitas pemikiran, keberanian untuk terus berjuang, dan komitmen tak tergoyahkan untuk menghadirkan kontribusi bermakna dalam ranah akademik dan kemanusiaan.***